

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. 2019. *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Alwi Smith, 2016, *Implementasi Kebijakan Persampahan*. Sleman, Deepublish.
- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafinindo, Depok,
- Budi Winarno, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Jogjakarta,
- Faiar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta : Pustaka Pelajar,
- Inu Kencana Syafiie, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Marzuki Peter Muhammad, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta : Kencana Perss,
- Moh. Mahfud. MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UUI Press,
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta,
- Prajudi Atmosudirdjo, 1984, *Hukum Adminsitasi Negara*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- The Liang Gie, 2018, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta,

Jurnal dan Makalah

- Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Uin sunan gunung djati. Dalam *jurnal Publik*, Volume 11 Nomor 1, 2017

Anjania Rayi Saputri and Muhammad Iqbal Hardiyan. "Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan." *Journal of Society Bridge* 3.2 2025.

Antoni, Veri, and Azka Farrell Razaga. "Permasalahan hukum pada kegiatan koperasi simpan pinjam di Indonesia." *Veritas et Justitia*, Volume 10, Nomor 1, 2024.

Anwar Musadad, et al. "Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Koperasi Digital: Inisiasi Koperasi Merah Putih Di Cipayung Asri, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Isei* ,.Vol 3, Nomor 1, 2025

Fierany Pantow, Buddy.J Tampi, Rully Mambo, Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanong V Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, *Universitas Sam Ratulangi*, Jurnal Administrasi Publik, Vol V Nomor 084 Tahun 2019,

Hilda, Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, and Siti Kunarti. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden." *Jurnal USM Law Review*, Vol 8, Nomor 2, 2025,

I Wayan Suandi, Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*,. Vol.1 No.1, 2013

Marsuyetno, Analisi Implementasi Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup do sumatera utara. *Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik*. Dalam *jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No.2, 2013

Moh Musfiq Arifqi Moh Musfiq. "Konsep ekonomi kerakyatan sebagai pengembangan koperasi syariah di Indonesia (Telaah pemikiran Muhammad Hatta)." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 2, Nomor 2, 2020.

Norhana, Implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Pasang Kayu Kabupaten Mamuju Utara, Dalam *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5, 2016.

Nur, M. Arya. Kebijakan Publik dan Legalitas Tindakan Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Yuridis-Normatif. *Jurnal Atribusi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2026.

Sujud, Fatih Atsaris, and Salwa Nabila Nihaya. "Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Manajemen Operasional Koperasi Merah Putih Menuju Kinerja yang Berkelanjutan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Ghobi*, Volume 3. Nomor 1, 2026,

Yeni, Maulia, et al. "Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Koperasi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Nurul Islam Jember." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol 1. Nomor 6, 2025.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;